

## **Pendampingan Aparatur Gampong Keumuneng Hulu Kabupaten Aceh Timur Dalam Pembuatan Draft Qanun**

**Rini Fitriani<sup>1</sup>, Siti Sahara<sup>2</sup>, Bustami<sup>3</sup>, Auliaurrahman<sup>4</sup>, Zulfiani<sup>5</sup>**

Rinifitriani@unsam.ac.id<sup>1</sup>, sitisahara@unsam.ac.id<sup>2</sup>, bustami@unsam.ac.id<sup>3</sup>,  
auliaurrahman@unsam.ac.id<sup>4</sup>, zulfiani@unsam.ac.id<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Samudra

---

**Abstract:** *Gampong Qanun as legislation at the village level set by the Keuchik after being discussed and agreed with Tuha Peuet Gampong can be a guide for community life. However, the Human Resources of the Apparatus in the Keumuneng Hulu Village needed to make the Draft Gampong Qanun are not sufficient. Seeing this condition, the Community Service Team from the Faculty of Law, Samudra University needs to provide assistance to the Gampong apparatus in making the Draft Gampong Qanun. In the implementation of Community Service, the PKM Team started by conveying the socialization of the understanding and urgency of the Qanun to the Keuchik, Tuha Peut and gampong apparatus and then continued with technical guidance on how the format of the Draft Qanun should be drawn up, up to the step of assisting the village apparatus to complete the drafting of the Qanun. Gampong so that the draft Qanun is completed and submitted to the Keuchik and Tuha Peut for immediate approval.*

---

**Keywords:** Assistance, Apparatus, Gampong, Draft, Qanun

### **Pendahuluan**

Salah satu hikmah dari era reformasi adalah otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, sampai tingkat pemerintah desa dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini menjadikan desa atau dengan sebutan lain mempunyai hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur urusan masyarakat desa tersebut dan memiliki peran aktif mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini disebabkan desa sebagai sebuah daerah otonom menjadikan desa berperan utama dalam pengelolaan, pemberdayaan dan peningkatan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Sehingga mampu menggerakkan roda pembangunan yang harus diiringi kesadaran untuk memahami semangat otonomi bagi seluruh penggerak

warga desa dan kapasitas perangkat juga masyarakat dalam memahami tata kelola pemerintahan. Khusus di Aceh, Desa disebut dengan Gampong.

Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Qanun gampong merupakan dasar hokum dalam tatanan kehidupan masyarakat gampong. Qanun ini akan menjadi acuan dasar hokum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. "Qanun atau reusam atau juga peraturan-peraturan gampong penting karena akan menjadi dasar hokum dalam mengatur tatanan social masyarakat di masing-masing gampong. Qanun gampong merupakan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang juga mengatur tentang pemerintahan gampong. Qanun merupakan amanah Qanun tentang gampong yang telah disahkan legislatif yang substansinya tergantung keinginan masyarakat.

Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Tuha Peuet Gampong. Apa saja yang ingin diatur masyarakat Gampong dibuat dalam Qanun tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Oleh karena itu pemerintahan gampong yang belum membuat dan menyusun Qanun ini agar segera membuat atau menyelesaikannya.

Qanun Gampong disusun berdasarkan adat dan kebiasaan masyarakat yang sudah berlaku sebelumnya. Jadi, bukan membuat dan merumuskan aturan baru. Tetapi lebih kepada mendokumentasikan aturan yang sudah ada dan selanjutnya diformulasikan sesuai format serta ketentuan penyusunan peraturan di tingkat gampong. Seperti membuat Qanun tentang penyelenggaraan perkawinan, pengelolaan sumber daya alam, penertiban hewan ternak dan lain sebagainya.

Desa Keumuneng Hulu adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan birem bayeun, Aceh Timur, Provinsi Aceh, Indonesia. Desa ini berada di dataran tinggi dan memiliki potensi karit dan sawit yang cukup besar. Kehidupan masyarakat di Desa Keumuneng Hulu sangat kental dengan adat isitiadat dan budaya. Dimana hampir 99% suku Aceh dan sisanya campuran. Desa ini dipimpin oleh seorang Geuchik yang bernama M.rizal. Desa Keumuneng Hulu terdiri dari 2 Dusun yaitu. Dusun Baro, dan Dusun Tunong. terdapat 145 kepala keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 550 jiwa.

Masyarakat Desa keumuneng hulu pada umumnya berprofesi sebagai petani dan pengembala hewan. Berdasarkan fakta tersebut mata pencarian masyarakat desa keumuneng hulu sesuai dengan potensi yang terdapat pada daerah tersebut, dimana daerah tersebut memiliki komoditas utama yaitu sawit dan karet.

Masyarakat desa keumuneng hulu yang pekerjaannya mengharuskan mereka untuk terjun langsung kelapangan menyebabkan terciptanya kerjasama antar masyarakat sehingga tali persaudaraan antar masyarakat tergolong kuat. Ditambah lagi pemerintah setempat sering mengadakan kegiatan yang bersifat gotong royong yang dilakukan setiap seminggu sekali, yang bertujuan untuk menjaga lingkungan yang bersih dan nyaman. (Sumber data dari Kantor Geuchik Gampong Keumuneng Hulu tanggal 1 Agustus 2022)

Pemerintahan gampong dalam menyusun Qanun pengesahannya dilakukan oleh keuchik. Hal ini semata-mata agar setiap pemerintahan gampong memiliki peraturan sendiri yang mengatur tatanan sosial masyarakatnya. Masing-masing gampong memiliki perbedaan tatanan sosialnya. Jadi perlu setiap gampong memiliki peraturannya sendiri. Tetapi kenyataan banyak Gampong yang belum memiliki Qanun tersebut karena kurangnya Sumber daya manusia yang memfasilitasi dalam penyusunan Qanun Gampong tersebut, seperti di Gampong Keumuneng Hulu dan ada sebagian yang belum selesai penyusunan draf Qanunnya.

### **Metode**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dalam jangka waktu bulan Juni sampai dengan september 2022 sedangkan tempat pelaksanaan PKM adalah di Gampong Keumuneng Hulu, Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur, Propinsi Aceh.

Dalam kegiatan ini metode yang digunakan adalah:

1. Ceramah

Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang tata cara merancang dan membuat draft Qanun gampong yang mencakup latar belakang sebab dan tujuan merancang Qanun serta implikasinya jika melanggar Qanun tersebut.

2. Diskusi

Metode diskusi digunakan untuk meluaskan pemahaman isi materi dan memastikan bahwa semua peserta telah memahami dan mengerti tentang Qanun tata cara merancang dan membuat draft Qanun gampong dan nantinya dalam pelaksanaannya. Pada sesi ini juga diadakan diskusi terpadu (focused group discussion) untuk mendiskusikan apa yang dirasakan dan dipikirkan peserta dengan adanya pemberlakuan Qanun tersebut. Pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh peserta dicatat untuk menjadi rekomendasi bagi program selanjutnya dalam pendampingan dalam pembuatan draft Qanun dalam mengimplementasikan penerapan.

Pada kegiatan PKM Pendampingan Terhadap Aparatur Gampong Keumuneng Hulu Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur Dalam Pembuatan Draft Qanun Gampong dilakukan dengan empat tahap, Tahapan Koordinasi dan Perencanaan, Tahapan Pelaksanaan Kegiatan, Tahapan Monitoring dan Evaluasi dan Tahapan Pelaporan.

Pada tahapan Koordinasi dan Perencanaan, team PKM melakukan peninjauan lokasi dan koordinasi dengan Geuchik Gampong mengenai akan dilaksanakan PKM. Setelah tahapan koordinasi selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan, dimana pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di Balai Gampong yang dihadiri oleh Geuchik, Aparat gampong, Tuha Peut, dan perwakilan masyarakat lainnya.

Pelaksanaan PKM ini menggunakan metode Pendampingan dimana peserta diberikan bahan-bahan untuk pembuatan peraturan desa termasuk contoh peraturan desa. Sebelumnya diberikan penjelasan mengenai peraturan desa dan urgensinya dengan pentingnya menyusun peraturan desa yang baik dan benar.

Tahapan selanjutnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKM. Dimana diketahui hasil monitoring dan evaluasi terhadap peserta PKM diperoleh data bahwa peserta PKM sudah terbantu dan memahami mengenai pemaparan PKM. Tahapan terakhir adalah tahapan pembuatan laporan PKM yang kemudian diikuti dengan luaran PKM yaitu pemuatan kegiatan PKM pada jurnal nasional.

## **Pembahasan**

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat (PKM) dilaksanakan oleh Tim PKM di Gampong Keumuneng Hulu dihadiri oleh Keuchik dan seluruh aparat gampong serta tokoh masyarakat setempat. Sesuai Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2011

tentang Pemerintahan Gampong dan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan gampong

Dalam PKM ini ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim antara lain: sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan untuk dapat merancang pembuatan draft Qanun Gampong.

#### 1. Sosialisasi

Langkah awal yang dilaksanakan oleh Tim PKM adalah mensosialisasikan kepada Keuchik dan seluruh aparatur gampong mengenai pengertian Qanun, urgensi pembentukan Qanun untuk mengatur kehidupan masyarakat di gampong dan tujuan pembentukan Qanun Gampong serta penggalan permasalahan yang kerap dialami oleh masyarakat sehingga lahir rekomendasi Qanun tentang apa saja yang harus segera dibentuk.

Setelah digali permasalahan tersebut, lalu Tim PKM mengadakan forum diskusi dan musyawarah yang melibatkan Keuchik, Tuha Peut, aparatur gampong, muspida gampong, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk merumuskan solusi atau penyelesaian dari seluruh permasalahan yang ada di gampong untuk selanjutnya di rumuskan menjadi Qanun gampong.



Gambar 1. Tim PKM menyampaikan sosialisasi dan berdiskusi dengan Keuchik dan Aparatur Gampong

Berdasarkan kegiatan sosialisasi maka dapat ditarik kesimpulan permasalahan yang kerap dialami adalah sebagai-berikut:

Tabel 1. Permasalahan masyarakat gampong Keumuneng hulu

<b>NO</b>	<b>PERMASALAHAN MASYARAKAT GAMPONG KEUMUNENG HULU</b>
1	Banyak Gangguan kebisingan dan ketenangan menjelang pelaksanaan ibadah shalat fardhu sampai selesai ibadah tersebut.
2	Banyak potensi pencurian, perampokan dan tindakan kriminal lainnya yang berupa hilangnya harta, bahkan nyawa.
3	Kunjungan tamu dari luar yang tidak ada batasan waktu, sehingga menimbulkan kecurigaan, dan sikap kewaspadaan yang tinggi.
4	Pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang berlawanan jenis yang semakin jauh dari peraturan perundang-undangan dan norma agama serta norma adat di gampong tersebut, baik melibatkan masyarakat setempat ataupun dari pihak luar gampong.
5	Perjudian dan peredaran khamar/minuman keras yang mulai dilakukan di gampong tersebut
6	Kekhawatiran akan terjadinya perselisihan diantara individu/perorangan di masyarakat yang harus dirumuskan pedoman untuk penyelesaian tersebut akan tidak menjadi konflik yang lebih besar.
7	Permasalahan dibidang penelantaran tanah yang kerap terjadi setelah di tanah di lakukan jual beli sehingga menjadi tanah yang tidak produktif
8	Minimnya perhatian kontribusi yang diberikan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Keumuneng terhadap masyarakat di gampong Keumuneng Hulu, padahal sumber aliran air yang menjadi bidang usaha perusahaan daerah tersebut berasal dari Keumuneng Hulu.
9	Pelestarian lingkungan sungai dan kelangsungan ikan terganggu karena terdapat oknum yang melakukan penangkapan ikan dengan cara diracun sehingga rusaknya kelestarian ikan dan habitatnya.

Sumber: Hasil diskusi (tanya jawab) Aparatur dan masyarakat gampong

## 2. Bimbingan teknis

Setelah Tim mengadakan diskusi dan musyawarah, maka perlu dilakukan bimbingan untuk pembuatan draft Qanun gampong, karena Tim mengidentifikasikan

beberapa kendala dan tantangan Keuchik dan Aparatur Gampong dalam pembuatan Draft Qanun gampong yaitu sebagai berikut.

- a. belum tersedia aparatur gampong yang memiliki Sumber daya Manusia (SDM) yang memadai dalam bidang perancangan dan pembuatan Draft Qanun gampong
- b. Kelemahan dan kesulitan dari aparatur gampong dalam menentukan redaksi Bahasa yang akan dirumuskan dalam Qanun yang benar dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang ada di Indonesia atau tidak bertentangan dengan undang undang yang lebih tinggi.

Kendala yang telah dijelaskan tersebut, lalu di selesaikan dengan proses bimbingan teknis sehingga SDM aparatur gampong terpenuhi dan kemampuan bahasa hukum dalam pembuatan Qanun meningkat sehingga mampu untuk membuat Draft Qanun yang butuhkan masyarakat.

Hasil bimbingan teknis ini pula maka setelah dipustuskan secara musyawarah maka diprioritaskan Pembuatan Dratt Qanun tentang Ketertiban dan Keamanan Gampong, selain Qanun-qanun lainnya yang juga dibutuhkan.

### 3. Pendampingan

Langkah selanjutnya setelah proses sosialisasi dan bimbingan teknis, maka tim melaksanakan pendampingan terhadap Keuchik dan Tuha Peut serta Aparatur gampong untuk menjalankan wewenangnya di bidang legislasi (pembentukan perundang-undangan) ditingkat gampong.

Dalam melakukan pendampingan, tim PKM menjelaskan bahwa dalam pembentukan Qanun gampong harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan peraturan di gampong yaitu:

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Qanun Gampong.



Gambar 2. Tim PKM bersama Keuchik, Tuha Peut dan Aparatur Gampong setelah selesai melakukan bimbingan dan pendampingan dalam pembuatan Qanun gampong

- (2) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam proses penyusunan Rancangan Qanun Gampong.
- (3) Hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai tata tertib gampong.

Hal ini menjadi sangat penting karena salah satu tujuan pemberlakuan hukum adalah Kemaanfaatan bagi masyarakat. Qanun sebagai salah satu produk hukum diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Setelah mendengar dan menerima segala masukan dari masyarakat maka selanjutnya Rancangan Qanun Gampong dibahas secara bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong. Karena SDM aparat gampong yang sudah baik dan memadai. Atas kerja keras tim melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis maka tim hanya perlu memberi arahan dan masukan dalam pembuatan Draft Qanun gampong sehingga Draft Qanun tentang Ketertiban dan keamanan berhasil diselesaikan dengan lancar, tepat waktu dan tidak mengalami hambatan. Proses selanjutnya adalah setelah Draft Qanun tentang keamanan dan ketertiban selesai maka tim PKM menyerahkan Draft Qanun tersebut ke Keuchik dan Tuha Peut untuk segera disahkan.

### **Kesimpulan**

Dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Tim PKM Dosen Fakultas Hukum Universitas Samudra dapat di sampaikan beberapa kesimpulan yaitu



bahwa dalam pelaksanaan PKM ini ada beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain: Sosialisasi tentang urgensi pembentukan Qanun dalam kehidupan masyarakat, bimbingan teknis untuk pembuatan draft Qanun gampong, serta pendampingan terhadap Keuchik dan Tuha Peut serta Aparatur gampong dalam pembentukan Qanun gampong. Setelah PKM ini, maka Keuchik, Tuha Peut dan aparatur gampong akhirnya memiliki Sumber Daya Manusia yang memiliki skill dan kemampuan dalam pembuatan Qanun Gampong. Skill dan Kemampuan Keuchik Tuha Peut dan aparatur gampong merupakan cerminan dari azas pemerintahan yang baik (good governance) yang sangat harus dijunjung oleh para penyelenggara pemerintahan. Selain itu, ada beberapa catatan dari Tim sebagai rekomendasi untuk beberapa pihak yang terkait:

1. Keuchik, Tuha Peut dan Aparatur Gampong harus memiliki lembaga advokasi hukum yang berfungsi untuk memberikan bimbingan dan advokasi dibidang hukum kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami dan menyadari serta mengamalkan hukum yang berlaku di Indonesia sebagai tindak lanjut dari kegiatan PKM ini.
2. Keuchik, Tuha Peut dan Aparatur Gampong yang telah berhasil menyusun Draft Qanun ini agar meneruskannya hingga menjadi Qanun Gampong yang dapat diterapkan di masyarakat.

### **Ucapan Terimakasih**

Tim PKM Dosen Fakultas Hukum Universitas samudra mengucapkan Puji Syukur kepada Allah SWT, Shalawat kepada Nabi Muhammad SAW sehingga dapat menyelesaikan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Tim PKM Dosen Fakultas Hukum Universitas samudra mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Keuchik, Bapak Tuha Peut, Tengku Imam Gampong, serta seluruh jajaran pemerintah gampong yang telah banyak memberikan bantuan baik secara moril maupun materil termasuk dalam kerjasama untuk menyukseskan kegiatan PKM ini. Tim PKM Dosen Fakultas Hukum Universitas samudra juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor, Bapak Dekan Fakultas Hukum, Bapak Ketua LPPM Universitas Samudra serta rekan-rekan Dosen Fakultas Hukum Universitas Samudra yang telah memberikan dukungan penuh untuk Tim dalam bekerja.

### **Daftar Pustaka**

- Direktorat Jendral PeraturanPerundang-undangan Departemen Hukum dan Ham. 2005. Buku pegangan Perancangan Peraturan Perundang-undangan. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan peraturan di gampong.
- Yahya Ahmad Zain. 2015. Legislative Drafting Perancangan Undang-Undang. Yudistira. Jakarta.
- Zainal Abidin, dkk. 2011. Qanun-Qanun di Aceh berbasis Hak Asasi Manusia. Demos. Jakarta